

**PENYELENGGARAAN PEMEKARAN NAGARI KOTO TANGAH
(KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu
(S1) Pada Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



OLEH:
Arif Alparisy/ 2016

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 4. Ketua | : Dr. Ernawati, M.Si |
| 5. Anggota | : Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd |
| 6. Anggota | : Drs. Afdhal, M.Pd |

1
2
3

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

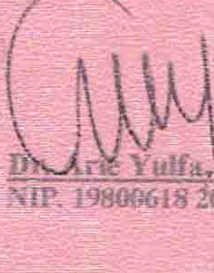
Judul : Penyelenggaraan Pemekaran Nagari Koto Tengah (Kecamatan
Tilatang Kamang Kabupaten Agam)
Nama : Arif Alparisy
NIM / TM : 16045063/2016
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing

Ketua Jurusan Geografi



Dr. Arie Yulfa, ST, M.Sc
NIP. 19800618 2006 1 003



Dr. Ernawati, M.Si
NIP. 19621125 198703 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu, tanggal ujian 10 Februari 2021 Pukul 09.20 WIB

PENYELENGGARAAN PEMEKARAN NAGARI KOTO TANGAH
(KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM)

Nama : Arif Alparisy
TM/NIM : 2016/16045063
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2021

Tim Penguji :

Nama

Tanda Tangan

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd

Anggota Penguji : Drs. Afdhal, M.Pd





UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI

Jalan. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang – 25131 Telp 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Alparisy
NIM/BP : 16045063/2016
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

“PENYELENGGARAAN PEMEKARAN NAGARI KOTO TANGAH (KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM) ” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Geografi

Dr. Arie Yulfa, ST, M.Sc
NIP. 196800618 200604 1 003

Padang, Juni 2021

yang menyatakan



Arif Alparisy
NIM. 16045063/2016

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia serta hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada peneliti, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Penyelenggaraan Pemekaran Nagari Koto Tangah (Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam)”**. Shalawat beserta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita pada alam yang penuh dengan pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua saya Ayahanda Alm Armaili dan Ibunda Ernita yang sangat saya cintai dan saya sayangi yang telah mencurahkan kasih sayang dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arie Yulva ST, MSc. selaku ketua jurusan Geografi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Ernawati, M.Si. selaku pembimbing akademik dan pembimbing Skripsi.
4. Penguji saya Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd dan Bapak Drs. Afdhal, M.Pd yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya.

5. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Geografi senasib seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT lah tempat berserah diri semoga Allah SWT memberi jalan kepada peneliti, peneliti juga menyadari bahwa proposal ini masih belum sampai ketahap sempurna. Untuk itu peneliti menerima saran, kritikan dan masukan yang bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Maret 2021

Peneliti

ABSTRAK

Arif Alparisy, PENYELENGGARAAN PEMEKARAN NAGARI KOTO TANGAH (KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM), Skripsi, Padang : Universitas Negeri Padang, 2021

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) proses pemekaran, dan (2) tujuan pemekaran yang terdapat pada daerah Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi non partisipatif, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses pemekaran Nagari Koto Tengah dilatarbelakangi karena wilayah yang luas dan memaksimalkan dana desa, alur pemekaran berawal dari kesepakatan masyarakat, musyawarah, hingga pembuatan proposal kepada Kabupaten, mengumpulkan kurang lebih 800 KK untuk memenuhi syarat-syarat pada pemekaran Nagari Koto Tengah, masyarakat melakukan swadaya untuk biaya pengadaan kantor serta peralatannya. Kemudian (2) tujuan pemekaran Nagari Koto Tengah dari hasil penelitian adalah pelayanan masyarakat belum adanya peningkatan dan Nagari hasil mekar hanya bisa mengadakan surat perantara kepada Nagari induk untuk segala administrasi, dalam pertumbuhan kehidupan demokrasi, jabatan wali nagari untuk sekarang berupa pilihan Bupati yang menjadi Penanggung Jawab Nagari Persiapan saat proses pemekaran, untuk pembangunan ekonomi, dana APBD/APBN untuk Nagari pemekaran masih diberikan melalui Nagari induk, belum adanya peningkatan potensi daerah karena masih tahap menuju Nagari Definitif, mengalami peningkatan yang mempermudah dalam menjaga ketertiban dan keamanan dengan adanya lembaga "*parik paga*", hubungan antar daerah dan pusat belum adanya kerjasama yang konkret namun mampu mesukseskan program KB yang berupa salah satu program pemerintah pusat.

Kata kunci : Proses, Tujuan, Pemekaran Nagari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Teori Pengembangan Wilayah.....	8
2. Konsep Pemekaran Wilayah.....	12
B. Penelitian Relevan.....	23
C. Kerangka Konseptual.....	26
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Setting Penelitian.....	29
C. Instrumen Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV.....	38
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Temuan Penelitian.....	38
B. Pembahasan.....	52
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
Lampiran 1.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	30
Gambar 2 Wawancara dengan Budi Satria	42
Gambar 3 Wawancara dengan Zul Fachri.....	42
Gambar 4 Wawancara dengan Emirson	43
Gambar 5 Wawancara dengan Nelmayetti.....	47
Gambar 6 Wawancara dengan Rafliis	48
Gambar 7 Wawancara dengan Elida Fitriani	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pedoman Observasi Lapangan	30
Tabel 2 Pedoman Wawancara	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sejak reformasi mengeluarkan peraturan otonomi daerah untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) memberi peluang otonomi daerah yang luas. Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 sebagai amandemen UU No. 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi. Salah satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut adalah timbulnya fenomena pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah adalah pemisahan diri suatu daerah dari wilayah induk disebabkan beberapa faktor dan membentuk wilayah administrasi sendiri. Faktor tersebut bisa dari masyarakatnya, luasnya wilayah, ketersediaan kantor administrasi pemerintahan. Pemekaran wilayah dilakukan agar tidak terjadinya

kesenjangan pembangunan dan untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memudahkan public service di daerah otonomi baru yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat pada daerah pemekaran.

Pemekaran wilayah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu: birokrasi tidak panjang, lebih menguasai daerah karena tidak luas, sebagai terobosan untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan, terbukanya lapangan kerja baru setelah terbentuknya daerah otonom baru, dapat mengelola sumber daya alam(SDA) sendiri, penduduk public lebih memuaskan dikarenakan kinerja. Dan kekurangan dari pemekaran wilayah yaitu: pemerintah pusat dan daerah sulit untuk mengontrol wilayah karena terdapat wilayah baru, berpotensi terjadinya korupsi ketika pada masa pembangunan daerah otonom baru, banyak kepentingan membonceng pemekaran pembentukan daerah baru, ketidaksiapan masyarakat yang daerahnya dimekarkan akan mengundang permasalahan.

Nagari Koto Tangah telah melakukan pemekaran wilayah. Nagari Koto Tangah adalah sebuah nagari yang termasuk wilayah kecamatan Tilatang Kamang, Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini menjadi pusat pemerintahan kecamatan Tilatang Kamang. Di Nagari Koto Tangah terdapat 28 jorong dengan jumlah penduduk 17.080 jiwa (2018). Nagari ini berbatasan sebelah utara dengan Nagari Kamang Mudik, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Kapau dan Nagari Gadut, sebelah barat berbatasan dengan Koto

Rantang dan Nagari Pasia Laweh, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Koto Baru III Jorong dan Nagari Panampung.

Pada tanggal 29 Desember 2019 Bupati Agam telah mengesahkan pemekaran wilayah Nagari Koto Tengah dengan pelantikan Penanggung Jawab Nagari persiapan. Nagari Koto Tengah dimekarkan menjadi lima nagari dengan empat Nagari persiapan diantaranya: Koto Tengah Sidang Koto Laweh, Koto Tengah Koto Malintang, Koto Tengah Tujuh Nagari dan Koto Tengah Lamo.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Koto Tengah, faktor dimekarkannya Nagari Koto Tengah adalah pertama wilayahnya yang luas yang menyulitkan dalam pembangunan dan pengelolaan, selanjutnya jumlah penduduk yang yang besar (17.080 jiwa), kemudian guna peningkatan pelayanan masyarakat dan yang terakhir sebagai percepatan pembangunan. Proses ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 dengan pengajuan proposal kepada pemerintah Kabupaten Agam. Hal pertama yang dilakukan yaitu usaha memenuhi syarat pemenuhan 4.000 jiwa atau dengan pengumpulan minimal 800 KK dimasing-masing Nagari yang dimekarkan, memenuhi sarana prasarana dan pengangkatan pejabat kenagarian. proses untuk menjadi nagari definitif bisa berlangsung 1 sampai 3 tahun. Apabila laporan kerja Nagari bagus dan tercapai syarat-syarat menjadi nagari, barulah Nagari Koto Tengah menjadi Nagari Definitif dan benar benar diakui sebagai Nagari yang sah oleh Negara.

Menurut Gulo(2007), tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh basis

ekonomi rakyat, mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat, membuka peluang dan lapangan pekerjaan dan memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung. Dari pernyataan tersebut, pemekaran wilayah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan kehidupan masyarakat menuju kearah yang lebih baik.

Namun pada pemekaran daerah di Nagari Koto Tangah, ada masyarakat yang berpendapat negatif terhadap pemekaran wilayah. Wawancara dengan salah satu masyarakat menyatakan bahwa pemekaran wilayah Nagari Koto Tangah hanya membebani kehidupan masyarakat karena biaya untuk pemekaran berasal dari swadaya masyarakat. masyarakat diharuskan membayar iuran sebesar sepuluh ribu rupiah per rumah dalam waktu sekali sebulan selama satu tahun. Iuran tersebut berguna untuk membayar gaji pejabat nagari dan biaya lainnya. Masyarakat merasa keberatan karena iuran yang harus dibayar bukan hanya iuran swadaya pemekaran saja, Ada iuran dana sosial, iuran lampu jalan, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat lain masyarakat menyatakan bahwa pemekaran Nagari Koto tangah tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat karena selama ini proses pembangunan di Nagari koto Tangah tidak terlihat oleh masyarakat.

Jika kondisi ini terus berlanjut di tengah-tengah masyarakat, dapat mempengaruhi proses pemekaran Nagari Koto Tangah karena proses dari Nagari persiapan menuju Nagari definitif dinilai dari laporan dan kinerja masing-masing Nagari persiapan. Jika laporan dan kinerja Nagari Persiapan buruk pemekaran bisa digagalkan atau batal dan kembali masuk dalam wilayah

Nagari induk. Anggapan masyarakat yang negatif terhadap pemekaran mempengaruhi laporan dan kinerja Nagari persiapan. Dampak lain dari anggapan negatif masyarakat tentang pemekaran yaitu dapat memicu konflik dalam kehidupan masyarakat. Konflik yang terjadi yaitu perebutan kekuasaan dari pemuka masyarakat seperti Niniak Mamak dan tokoh masyarakat. Akan ada pro dan kontra yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Nagari Koto Tengah. Persepsi masyarakat dalam hal ini dinilai sangat penting karena persepsi seseorang mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat kedepan. Jika persepsi masyarakat sudah negatif terhadap pemekaran, tentu mempengaruhi keberhasilan dari pemekaran itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi menurut Wirawan (2002) dipengaruhi oleh Perhatian, Set (harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul), Kebutuhan, Sistem Nilai dan Ciri Kepribadian.

Dari pemaparan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penyelenggaraan Pemekaran Nagari Koto Tengah (Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam)**.

B. Fokus Masalah

Focus masalah dalam penelitian ini mengkaji bagaimana penyelenggaraan pemekaran Nagari Koto Tengah (Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam) tahun 2020.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemekaran Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam?
2. Bagaimana tujuan pemekaran Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemekaran Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
2. Untuk Mengetahui tujuan pemekaran Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis mengharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Jurusan Geografi Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Kontribusi dan aplikasi ilmu Geografi dalam bidang Geografi Pembangunan dan analisis wilayah, sekaligus menubuhkan wawasan dan untuk memperkaya kajian ilmu geografi dibidang pembangunan dan analisis wilayah.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau referensi dalam penelitian selanjutnya yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam

menentukan kebijakan dan kegiatan evaluasi untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh pemekaraan wilayah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang pemekaran Nagari Koto Tangah adalah jumlah Jorong yang mencapai 28 Jorong, wilayah yang terlalu luas, dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 19.000 jiwa yang menyulitkan dalam hal pelayanan publik. Alur pemekaran Nagari Koto Tangah dimulai dengan keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran, kemudian diadakan musyawarah seluruh lapisan masyarakat, setelah itu hasil rapat dibuat menjadi sebuah proposal dan dikirim ke Kabupaten melalui pihak Kecamatan barulah setelah itu turun keputusan diterima atau tidak pemekarannya dari Kabupaten. Syarat-syarat pemekaran Nagari Koto Tangah yang utama sekali yaitu pengumpulan 800 KK dari masing-masing wilayah Nagari yang dimekarkan, setelah itu barulah pemenuhan syarat yang lain seperti sarana prasarana seperti ruang kantor dan komputer.
2. Belum ada peningkatan pelayanan masyarakat baik itu pelayanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan karena status nagari baru pada tahap Nagari Persiapan. Penanggung Jawab Nagari Persipan yang ditunjuk langsung Bupati berasal dari PNS. Setelah nagari mencapai tahap definitif barulah diadakan pemilihan wali nagari langsung oleh masyarakat di masing-masing Nagari pemekaran. Belum ada Kerja sama antara nagari yang baru atau dalam tahap Nagari persiapan pemekaran dengan

pemerintah pusat dan pembangunan sarana prasarana karena status nagari masih persiapan. Potensi daerah Nagari Koto Tangah didominasi pertanian padi dan perkebunan. Ditambah dengan industri rumahan seperti kerupuk kamang dan mubel perabot. Usaha pengembangan belum ada karena masih dalam tahap Nagari Persiapan menuju Nagari Definitif. Keamanan dan ketertiban setelah pemekaran meningkat karena wilayahnya lebih kecil akibat pemekaran dan pendekatan dengan masyarakat juga lebih mudah. Usaha menjaga ketertiban dan kamanan, masyarakat juga ikut serta melalui ronda malam di setiap wilayahnya masing-masing di tambah dengan adanya lembaga “*parik paga*” yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan proses pemekaran suatu wilayah lebih transparan dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi anggapan dan persepsi yang salah dari masyarakat terutama masyarakat biasa didaerah yang dilakukan pemekaran.
2. Diharapkan tujuan pemekaran suatu wilayah dapat terwujud dan terlaksana lebih cepat agar kehidupan masyarakat didaerah yang dimekarkan menuju kearah yang lebih baik dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. *Enam belas pemekaaraan/pembentukan Daerah Otonom*. Diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 17.15WIB
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Asrori. 2009. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: CV Wacana Prima.
- Gulo M.R. 2007. *Memahami dengan benar tujuan pemekaan*. Diakses pada tanggal 30 januari 2020, pukul 18.00 WIB
- Harmantyo, DJ. 2011. *Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran daerah, dan polaperkembangan wilayah di Indonesia*. Diakses pada tangga; 29 Januari 2020, pukul1 4.17 WIB.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Statistika 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prabowo,Aan .Heriyanto. 2013. Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan Sma Negeri 1 Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Halaman 1-9
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Robbins, Stephen P. 2000. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Rozuqi, Nur. "Pemerintah Desa dan Kalender Kegiatannya Bulan Juli 2020", <http://www.simpeldesa.com>, diunduh tanggal 05 November 2020
- Siagian, Sondang P. 2004. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Bimo, Walgito. 2003. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi
- Sirajuddin, Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukun Tata Negara Indonesia*. Setara Press. Malang
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.